

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kopi merupakan minuman yang sangat digemari oleh hampir semua kalangan masyarakat, mulai dari remaja, dewasa hingga sampai kepada orang yang lanjut usia. Saat ini kopi bukan hanya menjadi minuman yang disukai oleh masyarakat lokal saja, bahkan telah menjadi *trend* bagi masyarakat nasional dan tentunya telah merambah ke internasional. Kopi telah menjadi salah satu *trend* minuman dunia, dan kita sebagai salah satu negara penghasil kopi patut berbangga karena merupakan salah satu pemasok kopi terbesar dari beberapa negara di dunia.¹ Indonesia merupakan negara yang memiliki tanah yang subur sehingga menjadi tempat tumbuhnya berbagai tanaman yang bisa dimanfaatkan manusia, salah satunya adalah biji kopi. Kopi merupakan salah satu tanaman yang telah lama dibudidayakan oleh masyarakat, pengembangan tanaman kopi ini dilakukan masyarakat mulai dari menanam hingga proses pengolahan menjadi kopi bubuk yang siap untuk dikonsumsi.

Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi tidak hanya berperan penting sebagai

¹ Anggi Meiri, Analisis Perdagangan Kopi Indonesia Di Pasar Internasional, Jurnal Jurusan Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Hlm 2.

sumber devisa melainkan juga merupakan sumber penghasilan bagi tidak kurang dari satu setengah juta jiwa petani kopi di Indonesia.²

Saat ini, Indonesia merupakan produsen dan juga sekaligus konsumen penting komoditas kopi dunia. Posisi Indonesia sebagai konsumen penting karena kenaikan permintaan dalam negeri dapat mengurangi ketersediaan kopi untuk pasar ekspor bagi pasar dunia. Pada tahun 2017 Indonesia sebagai Negara produsen biji kopi menempati urutan keempat setelah Brasil, Vietnam dan Kolombia, dan sebagai konsumen berada dalam urutan ketujuh.³ Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, minum kopi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari terutama bagi remaja dan juga orang tua. Pada tahun 2017 pertumbuhan peminum kopi di Indonesia berkembang pesat yakni sebanyak 8%, hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan peminum kopi dunia yang hanya mencapai 6%. Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) menyebutkan pertumbuhan konsumsi kopi nasional tahun 2017 meningkat dari 0,8 kilogram per kapita menjadi 1,3 kilogram per kapita.⁴ Perkembangan industri kopi dunia juga berimbas pada industri kopi lokal di Indonesia. Industri kopi Indonesia mengalami peningkatan pada industri hilir sebagaimana ditandai dengan mulai maraknya kafe-kafe dan kedai kopi pada dewasa ini.

Dari segi produksi, Indonesia memiliki luas tanaman kopi terbesar kedua di dunia, namun Indonesia sebagai penghasil kopi sekaligus eksportir kopi hanya

² Pudji Rahardjo. Panduan Budidaya dan Pengolahan Kopi Arabika dan Robusta: Penebar Swadaya. Jakarta. 2012. hlm 7

³ International Coffee Organization (ICO), Trade Statistic Table. (<http://www.ico.org/>) diakses pada 13 Desember 2018.

⁴ Kementerian Pertanian, "Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017"

menduduki peringkat terbesar keempat dunia.⁵ Hal ini merupakan potensi untuk pengembangan kembali industri kopi bila produktivitas pada sektor produksi dan olahan dapat ditingkatkan.

Menurut data Kementerian Perindustrian, potensi Industri Kecil dan Menengah olahan kopi di dalam negeri didukung dengan 13 sentra produksi kopi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Daerah tersebut diantaranya Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua.⁶

Di Indonesia terdapat banyak daerah yang menjadi lokasi pengolahan kopi, salah satunya terdapat di Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Masyarakat Nagari Koto Tuo sekitar 70% warganya hidup dengan memanfaatkan tanaman kopi. Mulai dari penanaman hingga pengolahan kopi (sejak dari merendang, menggiling, mengemas, hingga pemasaran).

Tabel 1.1
Sumber Penghasilan Utama Penduduk Nagari Koto Tuo Tahun 2018

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Satuan
1	Industri pengolahan (kopi)	160	Orang
2	Perdagangan besar/ eceran (kopi)	10	Orang
3	Pertanian dan perkebunan	8	Kelompok
4	Pedagang eceran barang harian	24	Orang
5	Angkutan umum	1	Unit
6	Jasa	50	Orang
7	Lainnya (air, gas, perbankan, dll)	-	

Sumber: RPJM Nagari Koto Tuo Tahun 2018-2023

⁵ International Coffee Organisation, op. cit.

⁶ Eko Fajri, "Sumbar, Satu Diantara 13 Sentra Produksi Kopi Dukung Potensi IKM Nasional", <http://news.m.klikpositif.com/baca/16674/sumbar-satu-diantara-13-sentra-produksi-kopi-dukung-potensi-ikm-nasional> (diakses 2 Mei 2019, pukul 23.35 WIB).

Dari Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa sumber utama penghasilan masyarakat Nagari Koto Tuo berasal dari industri pengolahan kopi, dimana tercatat pengusaha kopi yang ada di Nagari Koto Tuo yaitu 170 orang. Hal ini menjadikan Nagari Koto Tuo sebagai Nagari penghasil kopi bubuk.

Disisi lain, sebagai daerah dengan jumlah pengusaha kopi yang banyak tentunya menyebabkan kebutuhan akan biji kopi di Nagari Koto Tuo juga besar, dalam hal ini Nagari Koto Tuo yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Tarab memiliki hasil perkebunan biji kopi yang tergolong cukup besar.

Tabel 1.2
Produksi Biji Kopi Kecamatan Sungai Tarab

Kopi Robusta	2013	2014	2015	2016	2017
Luas Panen (Ha)	233,00	215,00	214,00	212,00	134,50
Produksi (Ton)	130,66	98,54	139,55	114,89	80,87
Rata-Rata Produksi (Ton/Ha)	0,56	0,46	0,65	0,54	0,60

Sumber : Kecamatan Sungai Tarab Dalam Angka Tahun 2018

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat produksi biji kopi di Kecamatan Sungai Tarab, kebanyakan dari hasil tanaman kopi yang dipanen di Kecamatan Sungai Tarab digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi di Nagari Koto Tuo itu sendiri. Dalam pemanfaatannya, masyarakat Nagari Koto Tuo sebagai pengusaha kopi bubuk mampu memproduksi kopi bubuk dalam jumlah besar dan dipasarkan ke banyak daerah, hal itu dibenarkan oleh Wali Nagari Koto Tuo:

“Nagari Koto Tuo ini bisa dikatakan sebagai lumbung pengusaha kopi di Kabupaten Tanah Datar, karena para masyarakat kita telah terkenal dengan produk kopi kita itu banyak dan tersebar ke banyak tempat, mulai dari toko besar (swalayan) hingga kedai-kedai kecil di seluruh daerah, tidak hanya di Tanah Datar,

tetapi sudah mencakup wilayah Sumatera Barat dan bahkan ada yang sampai ke Pekanbaru”(Hasil wawancara dengan Wali Nagari Koto Tuo, Yusri, B.Sc, pada 25 Agustus 2018)

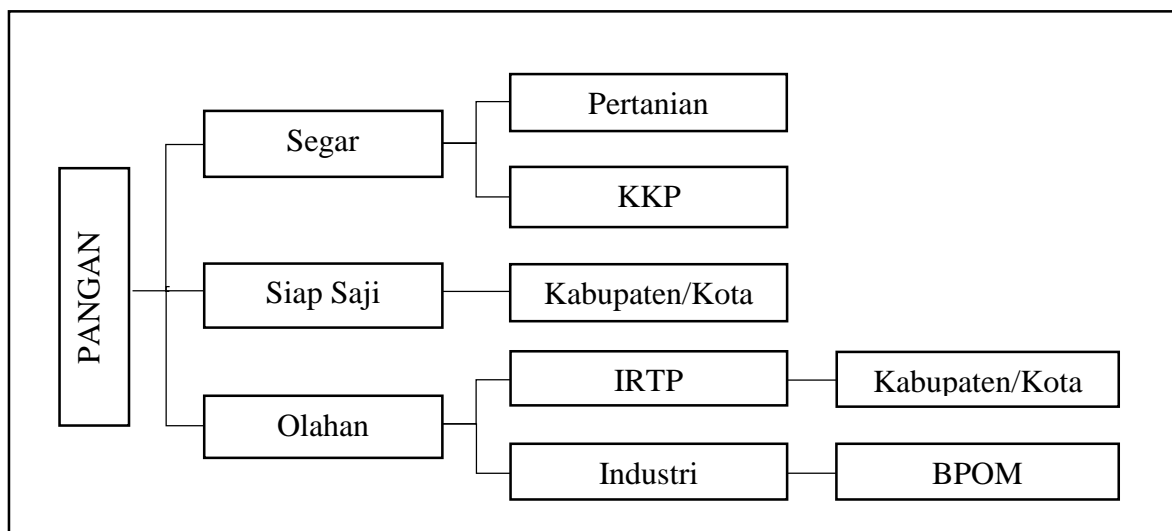
Berdasarkan wawancara diatas, pemasaran kopi bubuk yang berasal dari Nagari Koto Tuo sudah tersebar ke banyak daerah, dimana satu merek dagang kopi yang dimiliki masyarakat Nagari Koto Tuo biasanya menguasai satu hingga beberapa wilayah pemasaran. Usaha pengolahan kopi di Nagari Koto Tuo ini menyerap banyak tenaga kerja, setiap unit usaha mempekerjakan 1 sampai 5 orang. Jika dilihat dari skala unit usaha, umumnya unit usaha kopi bubuk yang ada di Nagari Koto Tuo ini masuk dalam kategori industri kecil atau lebih dikenal dengan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Sebagai sebuah produk olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat luas, hasil olahan IRTP haruslah memiliki mutu dan kualitas yang baik dari segi kesehatan dan keamanan produk, karena produk yang tidak higienis dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya.⁷ Dalam hal ini pemerintah selaku pihak yang bertanggungjawab menjamin kesehatan makanan dan produk berkewajiban mengontrol segala aktifitas yang dilakukan IRTP mulai dari proses produksi, pengemasan serta peredaran hingga sampai pada masyarakat sebagai konsumen. Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap pengawasan obat dan makanan telah menetapkan

⁷ Rahardjo, op.cit., hlm. 35

pembagian tugas dan wewenang terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan pangan.

Gambar 1.1
Pembagian Wewenang Pengawasan Keamanan Pangan



Sumber : BPOM Padang 2018, diolah peneliti

Dari Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa dalam pengawasan keamanan pangan, BPOM memberikan wewenang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengawasi IRTP di wilayah kerja masing-masing daerah. Selanjutnya, pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh IRTP. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, dan
2. Pengawasan *post-market* produk makanan-minuman Industri Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap produsen pangan siap saji dan IRTP dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, sedangkan pembinaan kepada pihak pemerintah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh BPOM.⁸ Hal ini sejalan dengan mandat yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada IRTP dengan sasaran untuk menghasilkan produk pangan yang aman, bermutu dan layak dikonsumsi serta mampu bersaing di pasaran.

Mengingat hal tersebut di atas, melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). SPP-IRT ini merupakan sertifikat yang wajib dimiliki oleh IRTP, dimana panduan dalam pemberian SPP-IRT ini disusun oleh BPOM dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan masing-masing daerah Kabupaten/Kota. SPP-IRT diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada pelaku IRTP yang telah memenuhi syarat dari segi keamanan dan kesehatan produk yang telah ditetapkan.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, hal ini sesuai dengan Rencana Strategis OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021. Berdasarkan tupoksi yang ada dapat dipahami bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar memiliki tugas dalam

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

mengawasi obat dan makanan, termasuk Industri Rumah Tangga.⁹ Hal ini tentu menjadikan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap izin IRTP kopi bubuk di Nagari Koto Tuo yang beredar luas di masyarakat. Untuk urusan mengawasi IRTP kopi bubuk di Nagari Koto Tuo ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar memasukkannya ke dalam tupoksi Seksi Kefarmasian yang berada di bawah naungan Bidang Kesehatan Masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh dr. Yesrita Zedrianis M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar yang peneliti dapatkan ketika wawancara.

“Untuk pengawasan terhadap IRTP kopi bubuk di Nagari Koto Tuo dilakukan dalam 2 tahap, yakni *pre market* dan *post market*. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar melalui seksi kefarmasian melakukan pengawasan *pre market* yakni pada saat penerbitan izin SPP-IRT yang diberikan kepada pengusaha kopi bubuk, sementara untuk pengawasan *post market* dilakukan oleh tim pengawas yang dibentuk berdasarkan SK Bupati...” (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, dr. Yesrita Zedrianis M.Kes, pada 15 Februari 2019).

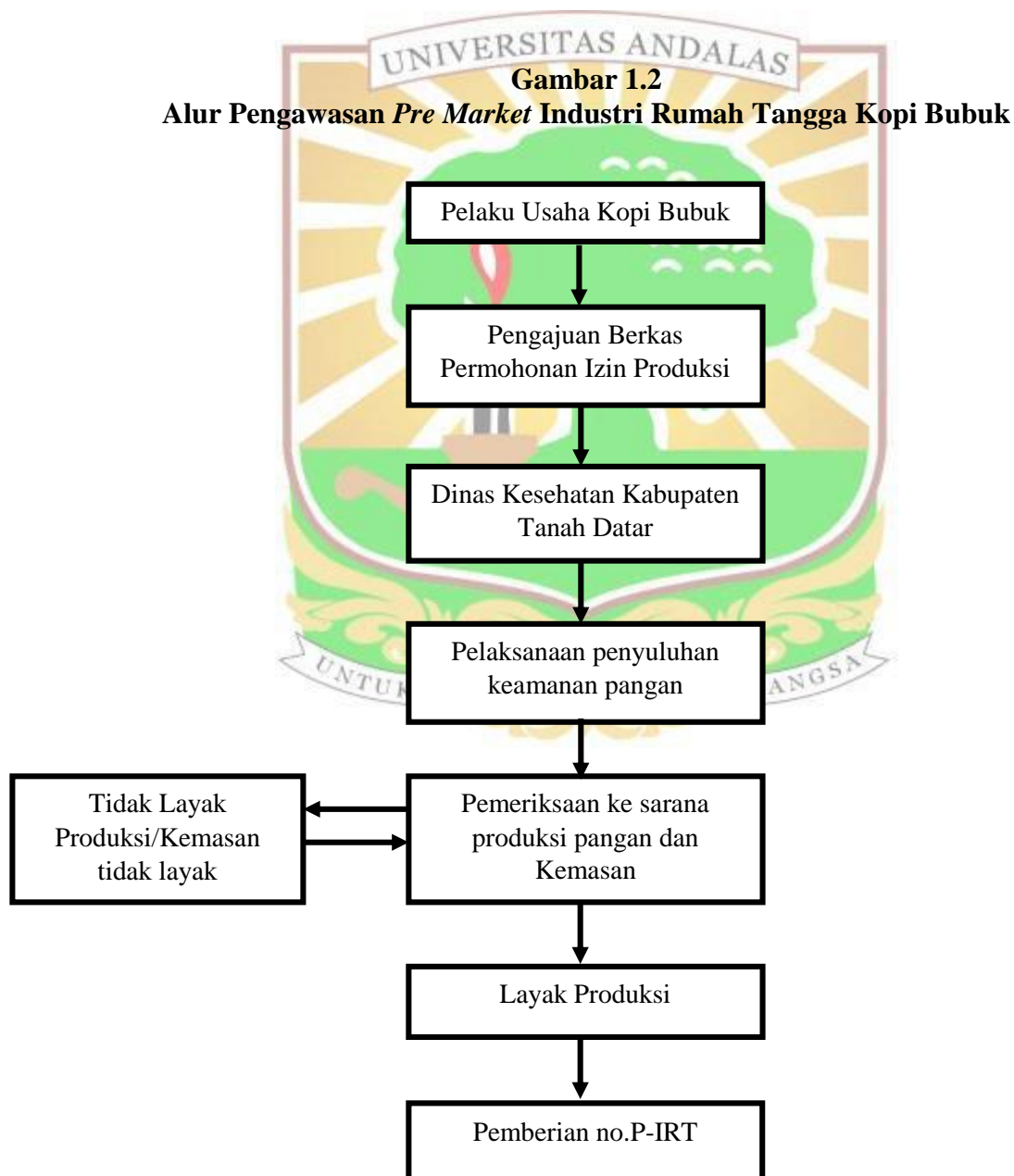
Dalam menjamin agar Industri Rumah Tangga kopi bubuk yang ada di Nagari Koto Tuo terjaga kualitasnya, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar melakukan serangkaian proses pengawasan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar melakukan pengawasan melalui pengurusan izin SPP-IRT yang wajib dimiliki oleh setiap pengusaha Industri Rumah Tangga. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Endah Sulistiyani selaku Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar yang peneliti dapatkan ketika wawancara.

“Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap Industri Rumah Tangga kopi bubuk sejak dari awal. Dimana kewajiban

⁹ Rencana Strategis OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021.

pelaku industri memiliki SPP-IRT menjadi alat kontrol yang kami gunakan dalam mengawasi Industri ini.”(Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kefarmasian, Endah Sulistiyani, pada 26 Agustus 2018)

Pengawasan *pre market* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk beredar di pasaran, antara lain melakukan standarisasi, pembinaan dan audit mengenai cara pembuatan produk kopi bubuk yang baik. Adapun alur pengawasan *pre market* adalah sebagai berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018

Pada Gambar 1.2 merupakan alur pengawasan *pre market* yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. Pada pengawasan *pre market* Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap IRTP kopi bubuk di Nagari Koto Tuo melalui pengurusan izin Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Pada alur pengawasan tersebut pelaku Industri Rumah Tangga kopi bubuk yang ingin melakukan pendaftaran izin usahanya dapat melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat permohonan izin produksi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. Surat permohonan izin produksi yang disetujui akan ditindaklanjuti dengan pendataan serta mengundang pengusaha kopi untuk mengikuti kegiatan penyuluhan keamanan pangan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan dengan mendatangkan narasumber dari BPOM, penyuluhan ini berisi tentang cara produksi pangan serta cara pengemasan produk yang baik. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Endah Sulistiyani selaku Kepala Seksi Kefarmasian Kabupaten Tanah Datar yang peneliti dapatkan ketika melakukan wawancara.

“Kami melakukan penyuluhan keamanan pangan secara periodik dua kali setahun dengan mendatangkan narasumber dari BPOM, pesertanya itu dari para pelaku usaha yang akan mengurus izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), termasuk dari pengusaha kopi bubuk. disini akan dijelaskan mengenai syarat dan cara produksi yang baik, cara pengemasan yang benar serta hal-hal yang menyangkut tentang keamanan produk.”(Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kefarmasian, Endah Sulistiyani, pada 15 Februari 2019)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan melakukan penyuluhan kepada pelaku Industri Rumah Tangga dengan maksud agar para

pelaku usaha dapat mengetahui dan memahami mengenai pentingnya keamanan dan kesehatan produk.

Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan, Dinas Kesehatan akan melakukan pemeriksaan terhadap lokasi produksi Industri Rumah Tangga kopi bubuk yang bersangkutan untuk melihat apakah kondisi sarana produksi sudah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan produksi kopi bubuk serta bagaimana cara pengemasan produk yang dilakukan, jika pada kegiatan pemeriksaan ditemukan persyaratan produksi yang belum lengkap, maka akan diberikan rekomendasi dan diperiksa ulang sampai sarana produksi yang dimiliki pengusaha kopi tersebut memenuhi syarat. Jika persyaratan mengenai sarana produksi yang ada sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Kesehatan akan memberikan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang dapat dicantumkan pada kemasan produk kopi bubuk yang akan diedarkan.

Pada kegiatan pengawasan *pre market* yang dilakukan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar menemukan beberapa kekurangan yang dimiliki pelaku Industri Rumah Tangga kopi bubuk di Nagari Koto Tuo, kekurangan ini terlihat pada tahap kegiatan produksi kopi bubuk serta pengemasan produk kopi yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini berdampak kepada sulitnya pelaku Industri Rumah Tangga kopi bubuk di Nagari Koto Tuo dalam mendapatkan izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Faktor yang menyebabkan kebanyakan Industri Rumah Tangga kopi bubuk di Nagari Koto Tuo dinilai belum layak produksi adalah proses pengolahan kopi di Nagari Koto Tuo

yang masih menggunakan cara tradisional, yakni dengan pemanfaatan kayu bakar sebagai alat pembakaran, dan lokasi pengolahan yang tergolong masih seadanya.

Gambar 1.3
Proses Pengolahan Kopi di Nagari Koto Tuo



Sumber : Dokumentasi Peneliti 2018

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat mengenai proses produksi kopi bubuk yang dilakukan di Nagari Koto Tuo. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar menilai cara produksi yang dilakukan pengusaha kopi bubuk di nagari Koto Tuo masih belum bisa dikatakan layak, hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Endah Sulistiyani selaku Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar yang peneliti dapatkan ketika wawancara.

“....Sebelum mengeluarkan izin edar dari kopi bubuk ini, kami melakukan survei lokasi produksi kopi yang ada di Nagari Koto Tuo, karena higienitas tempat produksi menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi. Namun karena tempat produksi yang tidak layak, hanya sedikit IRT yang memenuhi syarat untuk mendapatkan izin dari segi produksi....”(Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kefarmasian, Endah Sulistiyani, pada 26 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar menilai Industri Rumah Tangga kopi bubuk yang ada di Nagari Koto Tuo masih banyak yang belum memiliki lokasi produksi yang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan izin SPP-IRT serta layak untuk diedarkan.

Selain dari segi tempat produksi, hal yang harus dipenuhi oleh IRTP kopi bubuk adalah mengenai kemasan produk. Melalui Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga dijelaskan bahwa penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan adalah:¹⁰

1. Seharusnya menentukan karakteristik produk pangan yang dihasilkan
2. Harus menentukan tanggal kedaluwarsa.
3. Harus mencatat tanggal produksi.
4. Dapat menentukan kode produksi (Kode produksi diperlukan untuk penarikan produk, jika diperlukan)

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar mengakui bahwa kualitas kemasan produk yang dipakai oleh Industri Rumah Tangga kopi bubuk di Nagari Koto Tuo masih terkesan seadanya. Hal ini dibenarkan oleh Endah Sulistiyani selaku Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar yang peneliti dapatkan ketika wawancara.

¹⁰ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga

“....dari sisi kemasan produk juga terdapat masalah, dimana pada kemasan belum dilabelkannya unsur-unsur penting seperti komposisi yang ada pada produk serta waktu kadaluwarsa....”(Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kefarmasian, Endah Sulistiyani, pada 26 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kemasan produk kopi bubuk yang ada di Nagari Koto Tuo masih banyak yang belum memenuhi unsur-unsur yang harus ada pada setiap kemasan produk, seperti waktu kadaluwarsa serta komposisi produk yang belum dicantumkan pada kemasan. Hal ini tentu akan mengurangi kualitas produk yang dimiliki oleh produk IRTP kopi bubuk itu sendiri.

Dari permasalahan lokasi produksi serta kemasan yang dimiliki pelaku IRTP kopi bubuk di Nagari Koto Tuo, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar menilai kebanyakan Industri Rumah Tangga kopi bubuk yang ada di Nagari Koto Tuo tidak layak untuk melakukan produksi serta produk yang dihasilkan tidak layak untuk dikonsumsi dan diedarkan. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan yaitu melalui Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang dimiliki oleh Pengusaha kopi bubuk di Nagari Koto Tuo , dimana menurut data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan sampai tahun 2018 hanya 13 merek dagang kopi bubuk yang terdaftar telah menerima SPP-IRT.

Tabel 1.4
Daftar Pengusaha Kopi Yang Terdaftar Memiliki SPP-IRT di Nagari Koto Tuo

NO	TAHUN	PEMILIK	NAMA PRODUK	NOMOR IRT
1	2014	Soutah Khendri	Qahuah	2.10.1305.01.0202-19
		Ismet Intan	Gonjong Limo	2.10.1305.01.0184-19
2	2015	Syahril	Rangkiang Lamo	2.10.1305.01.0246-20
		Masril Efendi	Dua Sendok Emas	2.10.1305.01.0250-20
		Lelvi Gusrita	Putri Minang	2.10.1305.01.0264-20
		Yusrizal	Koto Tuo	2.10.1305.01.0277-20
		Muhnir	Minang Saiyo	2.10.1305.01.0214-20
		Rezi	Mak Angah	2.10.1305.01.0214-20
		Anas	Anak Mas	2.10.1305.01.0367-21
3	2016	Deni Desnita	Nike	2.10.1305.01.0369-22
		Erni Yenti	Putri Minang	2.10.1305.01.0370-22
		Ridawati	Capiccino	2.10.1305.01.0371-22
		Syamsu	Minang Super	2.10.1305.01.0400-22
		Tasmian	Kopi	2.10.1305.01.0238-23

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018

Izin SPP-IRT merupakan sertifikasi yang wajib dimiliki oleh setiap IRTP yang ada, termasuk IRT kopi bubuk yang ada di Nagari Koto Tuo. SPP-IRT ini akan menjadi bukti bahwa produk tersebut telah lolos uji kelayakan produksi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, sehingga masyarakat selaku konsumen bisa merasa aman dalam mengonsumsi produk tersebut. Mengenai hal tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari Fetra Ridwan selaku Pemilik Toko “KB” ketika wawancara.

“sertifikasi SPP-IRT menjadi suatu hal yang wajib dimiliki bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga, karena dengan begitu produk tersebut bisa dikatakan aman untuk diedarkan. Kami sebagai pemilik toko juga mewajibkan bagi pengusaha yang ingin mengedarkan produknya disini untuk memiliki izin tersebut.”
(wawancara dengan Fetra Ridwan selaku Pemilik Toko “KB” pada 4 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemilik toko mewajibkan bagi pengusaha yang ingin mengedarkan produknya untuk memiliki SPP-IRT. Hal ini dikarenakan SPP-IRT menjadi bukti bahwa produk tersebut

higienis dan telah diuji Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar sebagai produk yang layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya peneliti mendapatkan informasi terkait penggunaan SPP-IRT dari Syamsu selaku pengusaha kopi bubuk di Nagari Koto Tuo yang memiliki izin SPP-IRT. Berikut kutipan wawancaranya.

“izin SPP-IRT ini memang dirasa sangat perlu bagi kami pengusaha yang akan mengembangkan usahanya. Izin ini diperoleh bagi pengusaha yang dinilai sudah melakukan proses produksi yang sesuai dengan arahan dan aturan yang berlaku. Dengan adanya izin ini, saya bisa mengedarkan produk saya sampai ke pekanbaru tanpa takut untuk ditindak oleh pemerintah disana.” (wawancara dengan Marina selaku pengusaha kopi bubuk di Nagari Koto Tuo pada 6 September 2019).

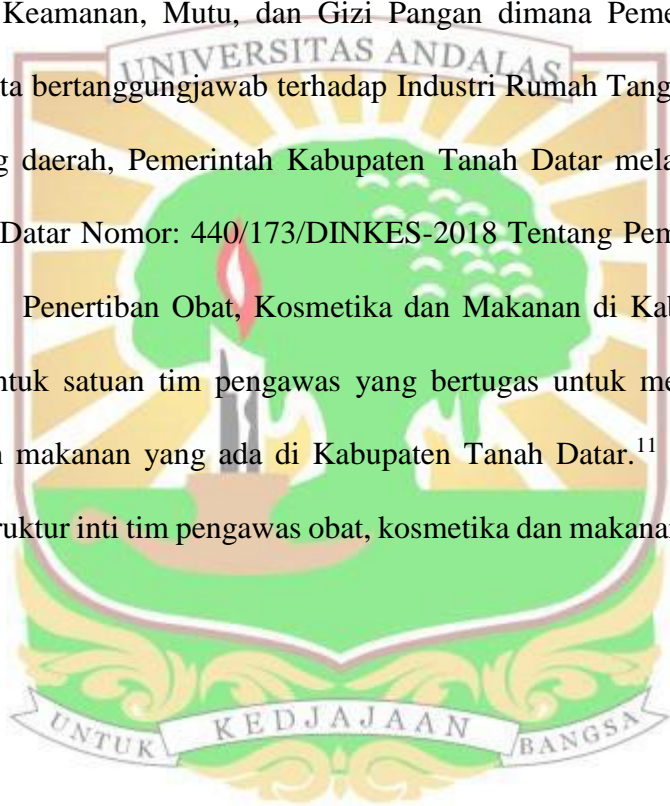
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa SPP-IRT menjadi hal yang wajib dimiliki oleh pengusaha kopi bubuk di Nagari Koto Tuo. Karena dengan adanya izin tersebut, pengusaha dapat mengedarkan produknya dengan mudah dan aman. Mengenai hal tersebut peneliti mendapatkan informasi dari Linawati selaku pengusaha kopi bubuk di Nagari Koto Tuo yang belum memiliki izin SPP-IRT. Berikut kutipan wawancaranya.

“saya pengusaha kopi bubuk yang belum memiliki izin SPP-IRT, karena saya masih menggunakan lokasi produksi bersama yang dinilai belum layak tersebut. Namun karena desakan ekonomi dan ini merupakan mata pencaharian utama saya, saya tetap mengedarkan produk kopi bubuk saya meskipun tidak memiliki izin SPP-IRT.” (wawancara dengan Linawati selaku pengusaha kopi bubuk di Nagari Koto Tuo pada 6 September 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pengusaha kopi bubuk mengaku belum memiliki izin SPP-IRT karena masih melakukan produksi di lokasi tempaan produksi bersama yang dilarang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. Namun karena desakan ekonomi pengusaha

tersebut tetap mengedarkan produk kopi bubuk miliknya meskipun tidak memiliki izin SPP-IRT.

Pengawasan selanjutnya yang dilakukan terhadap IRTP kopi bubuk yaitu pengawasan *post market*, yaitu pengawasan yang dilakukan saat produk kopi bubuk beredar di pasaran. Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan dimana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap Industri Rumah Tangga yang ada di masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 440/173/DINKES-2018 Tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Penertiban Obat, Kosmetika dan Makanan di Kabupaten Tanah Datar membentuk satuan tim pengawas yang bertugas untuk mengawasi obat, kosmetika dan makanan yang ada di Kabupaten Tanah Datar.¹¹ Berikut adalah daftar nama struktur inti tim pengawas obat, kosmetika dan makanan di Kabupaten Tanah Datar.



¹¹ Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 440/173/DINKES-2018 Tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Penertiban Obat, Kosmetika dan Makanan di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 1.3
Daftar Nama Struktur Inti Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Di
Kabupaten Tanah Datar

N0	NAMA	DALAM JABATAN KEDINASAN	DALAM JABATAN TIM
1.	Drs.H.Irdinansyah Tarmizi	Bupati Tanah Datar	Pengarah
2.	Zuldafri Darma	Wakil Bupati Tanah Datar	Wakil Pengarah
3.	Drs. Hardiman	Sekretaris Daerah Kab. Tanah Datar	Penanggung Jawab
4.	Drs. Mukhlis	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tanah Datar	Wakil Penanggung Jawab
5.	dr. Ermon Revlin, MPH	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar	Ketua
6.	Purwanto, SP, MPH	Kabid SDK Dinas Kesehatan	Sekretaris

Sumber: Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 440/173/DINKES-2018 Tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Penertiban Obat, Kosmetika dan Makanan di Kabupaten Tanah Datar

Selain struktur inti di atas, terdapat kelompok – kelompok kerja yang terbagi atas masing – masing Kecamatan, kelompok kerja ini diketuai oleh Camat masing-masing daerah dan beranggotakan dari berbagai pihak yakni; Ramil, Polsek, Polres Kabupaten Tanah Datar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Datar, Pol – PP Kabupaten Tanah Datar, Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar, UPT Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 440/173/DINKES-2018 Tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Penertiban Obat, Kosmetika dan Makanan di Kabupaten Tanah Datar dijelaskan bahwa Tim Pengawas dan Penertiban Obat, Kosmetika dan Makanan di Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas:¹²

¹² Ibid.

- a. Mengoordinasikan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban peredaran obat, kosmetika dan makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan atau ketentuan perundang-undangan di wilayah Kabupaten Tanah Datar.
- b. Melakukan peninjauan ke lapangan dalam rangka pengawasan dan penertiban obat, kosmetika dan makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan perundang - undangan.
- c. Melakukan pengadministrasian, dokumentasi dan pembuatan laporan setiap kegiatan pengawasan dan penertiban peredaran obat, kosmetika dan makanan.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Tanah Datar.

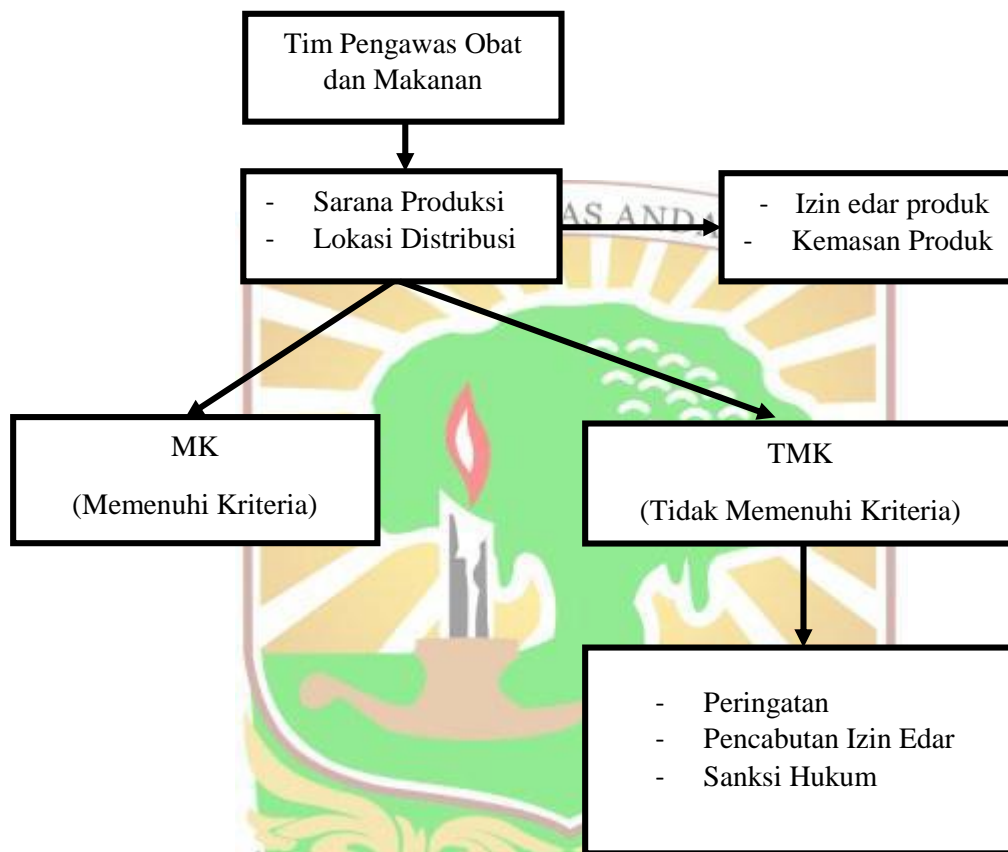
Dalam melaksanakan tugasnya mengawasi IRT kopi bubuk, Tim Pengawas Obat dan Makanan berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar melalui izin SPP-IRT. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Purwanto, SP, MPH selaku Sekretaris Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar yang peneliti dapatkan ketika wawancara.

“Dalam pelaksanaannya, Tim Pengawas berpedoman kepada data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar mengenai izin SPP-IRT. Sehingga hal tersebut menjadi rujukan bagi Tim Pengawas untuk bertindak di lapangan....”(Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar, Purwanto, SP, MPH, pada 13 Januari 2019)

Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar melakukan pengawasan *post market* terhadap IRT kopi bubuk. Berikut adalah alur

pengawasan *post market* yang dilakukan oleh Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar yaitu:

Gambar 1.4
Alur Pengawasan *Post Market*



Sumber: Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018

Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar melakukan pengecekan ke lokasi pemasaran produk kopi bubuk. Pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui apakah produk yang beredar di masyarakat sudah memiliki izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BPOM RI. Dari hasil temuan yang ada dapat dikatakan bahwa masih banyak produk kopi bubuk Nagari Koto Tuo yang belum

memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan (SPP-IRT) beredar di pasaran. Selain itu juga ditemukan produk kopi bubuk yang telah memiliki izin SPP-IRT namun tidak melengkapi ketentuan keterangan produk yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Purwanto, SP, MPH selaku Sekretaris Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar yang peneliti dapatkan ketika wawancara.

“....Dalam pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas masih ditemui beberapa produk kopi yang belum memiliki izin dan cacat secara kemasan. Temuan ini kami dapatkan dari berbagai toko, baik di *supermarket* maupun di warung-warung yang ada....”(Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar, Purwanto, SP, MPH, pada 13 Januari 2019)

Dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa terdapat pengusaha kopi bubuk di Nagari Koto Tuo yang tidak mematuhi aturan dan persyaratan mengenai label kemasan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, dalam menjaga agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan semestinya dan memberikan hasil yang maksimal, Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar juga melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan pengawasan agar hasil yang diinginkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar melakukan pendataan terhadap produk-produk yang menyalahi aturan tersebut, kemudian akan dilakukan tindakan evaluasi terhadap pihak yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Purwanto, SP, MPH selaku Sekretaris Tim Pengawas Obat,

Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar yang peneliti dapatkan ketika wawancara.

“...ketika kami mendapatkan temuan penyimpangan dilapangan, kami melakukan pendataan dan melakukan langkah lebih lanjut. Kami melakukan upaya persuasif dengan menghimbau pemilik toko untuk tidak menerima produk yang belum memiliki izin serta menyita produk yang bersangkutan, kemudian kapan perlu kami menghubungi si pemilik produk yang menyalahi aturan ini.” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar, Purwanto, SP, MPH, pada 13 Januari 2019)

Dari wawancara yang dilakukan dapat dipahami bahwa Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten melakukan penindakan terhadap IRTP kopi bubuk yang memasarkan produk namun tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten melakukan tindakan persuasif terhadap pemilik toko tempat produk kopi bubuk dipasarkan. Selain itu Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten juga melakukan tindakan persuasif terhadap pelaku industri kopi bubuk yang tidak mematuhi aturan agar bisa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar berupaya melakukan pengawasan dengan tujuan agar seluruh produk kopi bubuk di Nagari Koto Tuo memiliki kualitas produk yang sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah dan mampu bersaing dipasaran yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pelaku IRTP itu sendiri. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Purwanto, SP, MPH selaku Sekretaris Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar yang peneliti dapatkan ketika wawancara.

“Kami sebagai yang bertanggung jawab terhadap Industri Rumah Tangga kopi bubuk ini telah melakukan berbagai upaya terkait pengawasan, seperti kami mengumpulkan temuan-temuan yang kami dapatkan dari waktu ke waktu untuk kemudian di evaluasi dan dicarikan jalan keluar agar produk kopi bubuk ini bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun sampai sekarang kami masih menemukan kendala dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat pengusaha kopi bubuk di Nagari Koto Tuo maupun pemilik toko tempat peredaran produk yang masih kurang kooperatif.”(Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar, Purwanto, SP, MPH, pada 13 Januari 2019)

Dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar menemukan kendala dalam upaya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat pengusaha kopi bubuk di Nagari Koto Tuo maupun pemilik toko agar bersedia mengikuti aturan yang telah dibuat pemerintah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Terhadap Industri Rumah Tangga Kopi Bubuk Di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”. Hal tersebut tidak terlepas dari fenomena yang peneliti temukan tersebut kemudian menimbulkan sebuah asumsi bahwa pengawasan Industri Rumah Tangga kopi bubuk di Nagari Koto Tuo memiliki sejumlah permasalahan yang penting untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan oleh peneliti dengan pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan terhadap Industri Rumah Tangga Kopi Bubuk di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pengawasan Terhadap Industri Rumah Tangga Kopi Bubuk di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan/atau rujukan mengenai pengawasan terhadap Industri Rumah Tangga Kopi Bubuk di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar pada tahun selanjutnya.
2. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai pengawasan.
3. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lain yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi segenap pihak, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, Tim Pengawas Obat,

Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar, masyarakat Kabupaten Tanah Datar serta *stakeholders* lainnya yang dapat menjadi pihak pendukung pengawasan Industri Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai informasi tambahan untuk menyempurnakan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan.



